

Pembatalan surat keterangan hak mewaris terhadap anak sah berkewarganegaraan asing (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 105/pk/tun/2013) = Revokation of certificate of right of inheritance to legal foreign citizen children (case study of supreme court decision number:105/pk/tun /2013) / Marsha Frieda Ester Lumban Tobing

Lumban Tobing, Marsha Frieda Ester, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476583&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah diantara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dapat dilangsungkan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi akibat perbedaan kewarganegaraan diantara masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran internasional akan mempunyai permasalahan dengan status kewarganegaraannya serta hak mewarisnya. Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris atas anak yang mempunyai status Warga Negara Asing dan menyatakan ia sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibunya. Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris ini saudara-saudara kandung dari almarhumah mengajukan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah oleh negara sehingga kedudukan anak yang lahir dengan berstatus Warga Negara Asing tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Seorang anak yang berstatus Warga Negara Asing mempunyai hak mewaris dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun anak yang berstatus Warga Negara Asing tersebut dapat mewaris dari orang tuanya tetapi jika menerima warisan berupa hak milik menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria maka dia wajib melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang dalam putusannya tersebut membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menunjuk anak almarhumah sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan ibunya.

ABSTRACT

Marriage is basically an agreement to live together legitimately between a man and a woman. Marriage may take place within the territory of the Republic of Indonesia as well as outside of the territory of the Republic of Indonesia. Mixed marriage is a marriage that occurs due to differences in citizenship between each party namely the marriage between Indonesian citizens with foreign citizens. A child born from an international mixed marriage will face problems with their citizenship and inheritance rights. The Jakarta Heritage Hall publishes a Certificate of Inheritance Rights on a child who has a status of a Foreign Citizen and declares him her as the heir of his or her mother 39 s estate. Against this Memorandum of Inheritance, the siblings of the deceased filed an objection and appealed to the State Administrative Court to revoke the Letter of

Inquiry on the Rights of the Minister. To investigate this matter, the research uses analytical descriptive research, with normative juridical approach method and examined by qualitative approach. Marriages held abroad are considered valid by the state so that the status of the child born with the status of a Foreign Citizen is still recognized as a legal child. A child who is a Foreign Citizen has the right to inherit from his or her parent who is an Indonesian citizen. Although the child with the status of a Foreign Citizen may inherit from his or her parents, but if he receives inheritance in the form of property rights under Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, he shall be obliged to relinquish his right within 1 one year after obtaining such right. The author does not agree with the judge's decision who revoke the Certificate of Right of Inheritance Number W7.AH.06.10 36 VII 2010 dated July 19, 2010 which appointed the deceased son as the sole heir of his mother's treasures.